



**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PERINGATAN HUT KE-66 MPR/DPR-RI
DAN LAPORAN KINERJA DPR RI
TAHUN SIDANG 2010-2011**

SELASA, 6 SEPTEMBER 2011

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2011**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PERINGATAN HUT KE - 66 MPR/DPR RI
DAN LAPORAN KINERJA DPR RI
TAHUN SIDANG 2010-2011**

SELASA, 6 SEPTEMBER 2011

Acara :

1. Pidato Ketua DPR-RI Pada Rapat Paripurna DPR-RI Peringatan HUT MPR/DPR-RI Ke-66 dan Laporan Kinerja DPR-RI Tahun Sidang 2010-2011

MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA

PEMBAWA ACARA:

Menyanyikan Bersama Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dipersilahkan berdiri.

MENGHENINGKAN CIPTA

PEMBAWA ACARA:

Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua DPR-RI

KETUA DPR-RI:

Hadirin dan hadirat yang kami hormati,

Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala untuk mengheningkan cipta, seraya berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga arwah para pendahulu kita mendapat tempat yang sempurna di sisi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Dan kita semua diberikan kekuatan lahir dan bathin untuk meneruskan perjuangan mengemban amanat rakyat, menuju masyarakat adil, makmur, berdasarkan Pancasila, dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan cita-cita kita bersama. Mengheningkan Cipta Mulai!

Diperdengarkan Hymne Mengheningkan Cipta
oleh instrumen musik.

Selesai

PEMBAWA ACARA:
Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang Terhormat,

- **Ketua dan Wakil-wakil Ketua MPR-RI;**
- **Wakil-wakil Ketua DPR-RI;**
- **Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPD-RI,**
- **Bapak Ketua DPR-RI Periode,**
- **Bapak Ketua DPR-RI Periode**
- **Para Anggota DPR-RI,**
- **Sekretaris Jenderal MPR, DPR, DPD-RI, dan jajarannya,**
- **Para Undangan yang kami muliakan,**
- **Hadirin yang berbahagia,**

Alhamdulillahirrabil'alamin, puji syukur kita persembahkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya lah kita semua memiliki kekuatan serta insya Allah kesehatan yang baik, untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban serta pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Rasa syukur kita persembahkan pula kepada Allah SWT karena hari ini kita berkesempatan untuk hadir pada Rapat Paripurna DPR RI, untuk bersama-sama memperingati Hari Ulang Tahun MPR/DPR RI ke-66. Sekaligus dalam Rapat

Paripurna ini kami selaku Pimpinan DPR RI akan menyampaikan intisari Laporan Kinerja DPR-RI selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu pada Masa Sidang I sampai dengan IV Tahun Sidang 2010-2011.

Adapun tema acara HUT MPR/DPR RI tahun ini adalah **"Komitmen DPR RI terhadap Peningkatan Kapasitas Kelembagaan"**. Sebuah tema yang tepat, menggambarkan keteguhan kita bersama terhadap perlunya secara terus menerus dilakukan peningkatan kapasitas lembaga DPR, lembaga wakil rakyat, tempat kita melaksanakan tugas bagi bangsa dan negara.

Sebelum saya memulai Rapat Paripurna HUT MPR/DPR-RI, izinkanlah atas nama DPR-RI, kami menyampaikan ucapan "Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1432 H". Minal 'aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekaligus di hari yang fitri ini, kita jadikan momentum kebersamaan kita menyongsong masa depan Indonesia yang lebih baik. Semoga Tuhan Yang maha Kuasa, memberikan kekuatan lahir dan bathin pada pemimpin dan pengelola negeri ini, agar dapat membawa negeri ini menuju negeri yang baldhatun Thoyyibatun Warabbun Ghofur.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Sebelum saya menyampaikan gambaran dan evaluasi tentang kiprah DPR dalam mengemban fungsi-fungsi konstitusionalnya, khususnya dalam kurun waktu satu tahun ini, ijinkan saya mengajak anggota Dewan dan para hadirin untuk mengenal secara sepintas tentang sejarah perjalanan Parlemen Negara Republik Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan saat ini. Pengenalan ini perlu, agar kita tetap komit tentang misi atau kewajiban kita sebagai wakil rakyat, kepada seluruh rakyat dan bangsa, serta tetap sadar akan semangat yang mendasari lahirnya Parlemen di negara ini dengan segala perjuangannya.

Pada intinya, perjalanan sejarah Parlemen kita terbagi ke dalam 3 (tiga) fase, yaitu fase pertama, setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan dinamika demokrasinya, fase kedua, yaitu fase Orde Baru yang dimulai dengan Pemilu Tahun 1971, dan fase ketiga, yaitu fase Reformasi yang dimulai dengan Pemilu Tahun 1999 hingga sekarang.

Pembentukan lembaga perwakilan rakyat diawali dengan dibentuknya *Volksraad* (Dewan Rakyat) sebagai bagian dari kebijakan Politik Etis Belanda. Kemudian pada masa pendudukan Jepang, dibentuk badan perwakilan yang bernama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Badan ini selanjutnya menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Aturan Peralihan Pasal IV UUD 1945 berbunyi: "Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut UUD ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional". Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi pembentukan lembaga legislatif di Indonesia. Peristiwa pelantikan Anggota Komite Nasional yang dikenal dengan nama Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) oleh Presiden Soekarno, pada tanggal 29 Agustus 1945, inilah dijadikan sebagai hari jadi lembaga perwakilan di Indonesia. Jadi sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dimulai pada hari-hari pertama kemerdekaan bangsa Indonesia.

Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai lembaga demokrasi di Indonesia terus mengalami perubahan sesuai dengan kondisi dan perkembangan perubahan ketatanegaraan. Pada tahun 1950, bahkan sempat terbentuk DPR dan Senat RIS pada saat negara berbentuk Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya terbentuk DPRS (DPR-Sementara) pada saat berlakunya UUD Sementara Republik Indonesia. Pada tahun 1960, terbentuklah DPR Gotong Royong (DPR-GR). DPR-GR ini mengalami perubahan dan komposisi dengan terjadinya peristiwa G30S/PKI tahun 1965.

Peran lembaga perwakilan rakyat pada era ini, tidak menunjukkan jati diri sebagai lembaga perwakilan rakyat,

karena fungsinya lemah dalam kapasitasnya sebagai lembaga yang mengawasi jalannya Pemerintahan.

Selanjutnya pada masa Orde Baru, keberadaan lembaga perwakilan rakyat juga tidak mengalami perubahan substansial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pada masa ini, lembaga perwakilan rakyat dikondisikan sebagai "stempel Pemerintah", atau sebagai pembenar bagi hampir semua kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Orde Baru.

Orde Baru tumbang, bersamaan dengan lahirnya era reformasi pada tahun 1999.

Bagaimanakah peran dan fungsi lembaga DPR setelah kita memasuki era Reformasi? Lembaga demokrasi bergulir begitu cepat, perubahan-perubahan besar telah terjadi.

Memasuki era Reformasi, UUD 1945 mengalami empat kali perubahan (amandemen) yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan ini mempengaruhi bangunan struktur ketatanegaraan. Penyempurnaan atas bangunan struktur ketatanegaraan di era reformasi mengarah kepada terciptanya mekanisme *check and balances* antar lembaga negara, khususnya antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. DPR harus bekerja efektif, harus berwibawa agar "*rubber stamp*" yang melekat pada lembaga DPR di era sebelumnya tidak terjadi lagi.

Melalui perubahan UUD 1945, DPR lebih diberdayakan dengan diberikannya kekuasaan membentuk UU, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1), "dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang". Perubahan yang menonjol lainnya dalam struktur kelembagaan negara adalah lahirnya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), sebagai lembaga perwakilan yang baru di dalam tatanan kenegaraan Republik Indonesia. DPD-RI terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui Pemilu. Kehadiran DPD-RI juga diperkuat di dalam UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Bahkan sejak tahun lalu, telah dilakukan Sidang Bersama DPR dan DPD-RI dalam rangka mendengarkan Pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Kekuasaan dan wewenang DPR-RI dipertegas dalam Amandemen UUD 1945, selain memiliki fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, diberikan beberapa hak yang diatur dalam amandemen kedua UUD 1945, yaitu hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.

Kini, DPR-RI telah memasuki usia ke-66 tahun. Pada usia menuju tujuh dasawarsa ini, sudah sepatutnya kita sebagai bagian dari keluarga besar DPR-RI memiliki tanggungjawab

dalam mengemban amanat menjalankan fungsi perwakilan, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Terwujudnya DPR-RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang kredibel dalam mengemban tanggungjawab mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, merupakan cita-cita dan keinginan kita bersama.

Berbagai upaya, berbagai langkah perlu kita lakukan bagi optimalisasi kinerja DPR dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, yang telah mendapatkan dukungan dan penguatan, baik melalui amandemen UUD 1945 maupun perundangan lainnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, banyak kritik yang ditujukan terhadap lembaga kita. Semua kritik harus dapat kita jawab, tidak hanya dalam bentuk argumentasi pembenaran, tetapi dengan langkah-langkah nyata.

Berkenaan dengan itu, izinkanlah saya bertepatan dengan HUT MPR/DPR hari ini, menyampaikan Laporan Kinerja Dewan dalam kurun waktu Masa Sidang I sampai dengan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2010-2011. Laporan kinerja yang akan saya sampaikan ini, merupakan intisari Buku Laporan Kinerja DPR-RI yang telah dibahas dalam forum Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR, Pimpinan Fraksi-Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPR pada tanggal 23 Agustus 2011. Laporan *Executive Summary* secara lengkap telah dibagikan kepada para

anggota Dewan. Adapun intisari Laporan Kinerja DPR-RI itu adalah sebagai berikut:

- **Pelaksanaan Fungsi Legislasi**

Pelaksanaan fungsi legislasi dalam Tahun Sidang 2010—2011, pada dasarnya merupakan kelanjutan dari pelaksanaan fungsi legislasi Tahun Sidang 2009—2010. Penetapan program prioritas legislasi tahunan Tahun Sidang 2010, meliputi 70 RUU terdiri dari 36 RUU inisiatif DPR dan 34 inisiatif Pemerintah.

Sedangkan untuk program prioritas legislasi tahunan Tahun Sidang 2011 berjumlah 91 RUU, terdiri dari 37 RUU usul inisiatif DPR, 33 RUU inisiatif Pemerintah dan 21 luncuran RUU Tahun 2010. Selama tahun 2010, RUU yang telah dilakukan proses penyusunan/perumusan di DPR berjumlah 16, tahun 2011 berjumlah 30 RUU.

Selama tahun 2011 sampai dengan akhir Masa Persidangan IV, telah dilakukan pembahasan terhadap 23 RUU, baik RUU inisiatif DPR maupun RUU dari Pemerintah. Dari 23 RUU tersebut, 10 RUU di antaranya telah disetujui menjadi UU.

Dalam menjalankan fungsi ini, keterlibatan DPD-RI dalam memberikan kontribusi cukup positif, baik dalam usulan penetapan Prolegnas Prioritas Tahunan maupun dalam proses pembahasan RUU. DPD-RI juga telah memberikan usulan beberapa RUU kepada DPR melalui Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Kita akui bahwa dalam proses penyusunan dan pembahasan RUU, banyak kendala yang dihadapi. Kendala-kendala ini berdampak kepada lambatnya penyelesaian suatu RUU untuk disahkan menjadi UU. Kendala tersebut bersifat teknis dan non-teknis. Kendala teknis yang dihadapi antara lain berkaitan dengan sempitnya waktu, yang seringkali justru suatu RUU membutuhkan proses panjang dalam pembahasan. Tata Tertib menentukan batas waktu pembahasan hanya dua kali masa persidangan dan dapat ditambah satu kali masa persidangan, dengan persetujuan Badan Musyawarah DPR.

Kendala non-teknis berkaitan sulitnya memperoleh penyamaan pendapat antara DPR dan Pemerintah dalam hal substansi yang akhirnya menjadi materi yang cukup krusial. Untuk itulah, Pimpinan Dewan melakukan terobosan dan serangkaian langkah dalam upaya mengoptimalkan fungsi perundang-undangan. Keterlibatan Pimpinan Dewan dalam ikut menangani langsung beberapa RUU, konsultasi yang dilakukan secara intensif dengan fraksi-fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan yang menangani RUU, dan bahkan konsultasi dengan Presiden, telah dilakukan. Keterlibatan ini tidak hanya dalam menyepakati substansi, tetapi juga dalam hal mekanisme dan prosedur untuk percepatan penyelesaian RUU.

Dalam konteks inilah, DPR-RI meminta kepada Pemerintah untuk lebih kooperatif, utamanya dalam

pembahasan atas RUU yang berasal dari DPR sejak tahap penyampaian Surat Presiden (Surpres) hingga akhir pembahasan. Hal tersebut menjadi sangat penting mengingat semua pembahasan RUU harus mendapat persetujuan bersama DPR dan Presiden sebagaimana amanat UUD 1945.

- **Pelaksanaan Fungsi Anggaran**

Fungsi anggaran DPR dilakukan dengan penuh tanggungjawab sebagai amanat pasal 23 UUD 1945, dan bahkan dipertegas dalam amandemen kedua UUD 1945. Untuk memenuhi amanat tersebut, dalam Masa Persidangan I sampai IV Tahun Sidang 2010-2011, telah diselesaikan pembahasan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2011, dan telah diundangkan menjadi UU No. 10 Tahun 2010 tentang APBN Tahun Anggaran 2011.

Dewan juga telah menyelesaikan pembahasan terhadap RUU tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 2010 tentang APBN Tahun Anggaran 2011, dan telah diundangkan menjadi UU No. 11 Tahun 2011. Pelaksanaan fungsi anggaran Dewan, tidak hanya dilakukan pada proses pembahasan dan penetapan anggaran negara, tetapi juga dalam hal pengawasan terhadap anggaran negara. Dalam Tahun Sidang 2010-2011, Dewan telah menyelesaikan pembahasan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2009, dan telah diundangkan menjadi UU No. 7 Tahun 2010

tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2009.

Dalam proses pembahasan di tingkat I, Badan Anggaran memperhatikan dengan seksama pertimbangan DPD-RI, juga memperhatikan hasil telaahan BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan) atas Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2009, dan hasil pembahasan Laporan Keuangan Negara dari Komisi-Komisi DPR. Sementara itu, DPR RI juga telah menyelesaikan pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN tahun 2010.

Pada tanggal 23 Agustus yang lalu, RUU ini telah mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR dengan beberapa masukan rekomendasi dari Badan Anggaran DPR terhadap hasil pembicaraan tingkat I. Rekomendasi diberikan atas adanya catatan-catatan dari fraksi-fraksi DPR. Pemerintah diminta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan laporan keuangan, terutama Kementerian/Lembaga yang masih mendapat opini audit "tidak menyatakan pendapat" dan yang opininya menurun dari tahun sebelumnya. Pemerintah juga diminta menindaklanjuti Rekomendasi BPK-RI berkaitan dengan hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2010 yang belum diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Juga diminta segera menyelesaikan penyempurnaan perundang-

undangan di bidang PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang sudah tidak sesuai dengan UU di bidang Keuangan Negara, serta memberikan sanksi kepada Kementerian/Lembaga yang mengelola PNB di luar mekanisme APBN.

Pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2011-2012, Dewan sedang dalam proses pembahasan atas RUU APBN Tahun Anggaran 2012 dan Nota Keuangannya yang telah disampaikan oleh Presiden pada 16 Agustus yang baru lalu. Sesuai ketentuan UU, RUU ini akan diselesaikan pada akhir bulan Oktober, dua bulan sebelum UU APBN 2012 berlaku. Proses panjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan di bidang anggaran, perlu diketahui publik, sehingga masyarakat dapat menilai secara komprehensif dan objektif tugas di bidang anggaran. Pembahasan anggaran negara dilakukan sepanjang tahun, didahului Pembicaraan Pendahuluan, Laporan Semester yang merupakan bentuk pengawasan atas APBN, Pembahasan APBN Perubahan, Laporan Pertanggungjawaban APBN dan RUU APBN berikut Nota Keuangannya.

Dalam kaitan dengan pelaksanaan anggaran negara, Dewan menyarankan agar sistem dan prosedur terhadap pelaksanaan APBN tidak membelenggu sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam kebijakan anggaran Negara. Oleh karena itu, Pemerintah perlu mengkaji lebih jauh dan menciptakan suatu sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran negara, agar

apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dan tercapai tepat waktu serta tepat sasaran sesuai tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan anggaran negara.

- **Pelaksanaan Fungsi Pengawasan**

DPR RI telah melakukan fungsi pengawasan melalui beberapa kegiatan. Salah satunya adalah melalui Tim-tim Pengawas yang dibentuk DPR. *Pertama* adalah Tim Pengawas (Timwas) Century. Berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 16 Desember 2010, masa kerja Timwas Century diperpanjang selama 1 tahun. Dari beberapa kali pelaksanaan Rapat Kerja Timwas Century dengan beberapa Lembaga Negara pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2010-2011, telah dibahas 2 (dua) hal penting, yaitu pertama, pelaksanaan Audit Forensik, dan kedua, pelaksanaan *Cross Examination*. Setelah melakukan beberapa kali rapat kerja (tanggal 8 dan 15 Juni, 6, 13, dan 20 Juli 2011), Timwas Century memutuskan untuk membentuk Tim Kecil yang khusus untuk melakukan *Cross Examination* data dengan KPK.

Kedua, adalah Tim Khusus (Timsus) DPR RI terhadap Penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Saudi Arabia. DPR-RI telah mengambil langkah penting terkait dengan masalah TKI di luar negeri. Langkah-langkah tersebut antara lain dengan mendesak Pemerintah untuk melakukan kajian terhadap penghentian sementara (moratorium) pengiriman TKI yang

tidak terampil ke luar negeri khususnya ke seluruh negara di wilayah Timur Tengah. Negara-negara ini belum memiliki mekanisme perlindungan hukum dan perjanjian kerjasama dengan Indonesia sebagaimana amanat UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Selain itu, DPR juga meminta Pemerintah membentuk *Task Force* dengan penugasan khusus menangani 303 orang TKI yang terancam hukuman mati terutama di Saudi Arabia dan Malaysia. Kedua desakan tersebut telah ditindaklanjuti Pemerintah dan DPR-RI terus akan memantau keberlanjutan *Task Force* dan pemberlakuan moratorium sampai semua draft perbaikan efektif, upaya hukum dan diplomasi dimaksimalkan. Ke depan Pemerintah diharapkan hanya mengirimkan TKI yang terampil.

Ketiga adalah Tim Pengawas Otonomi Khusus Aceh dan Papua. Tim Pemantau UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh DPR telah menemukan adanya proyek pembangunan untuk kepentingan masyarakat yang belum terealisasi secara optimal.

Tim Pemantau Otonomi Khusus Papua menemukan bahwa terdapat penyimpangan Dana Otsus sebagai hasil audit BPK. Tim menghendaki agar hal ini tidak terjadi lagi pada masa-masa selanjutnya, antara lain dengan perlunya dibuat suatu

Rencana Induk Percepatan Pembangunan di Papua. Tim Pemantau Otonomi Khusus Papua menjamin bahwa komitmen DPR untuk tetap mendukung upaya percepatan kesejahteraan rakyat di Provinsi Papua lewat program Otonomi Khusus, tidak akan berubah walaupun terdapat temuan-temuan tersebut.

Keempat, adalah Tim-Tim Pengawas DPR RI terhadap Penanggulangan Bencana Alam (PBA) yang terjadi di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Jambi. Tim-tim tersebut telah secara intensif berkoordinasi dengan pihak-pihak Pemerintah dalam rangka menangani pemulihan kondisi ketiga Provinsi tersebut pasca bencana alam, serta melakukan kunjungan-kunjungan ke lapangan secara langsung.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Selama masa persidangan I sampai dengan IV, DPR RI antara lain telah membentuk beberapa Panitia Kerja (Panja) melalui keputusan Komisi-Komisi sebagai Alat Kelengkapan Dewan. Beberapa Panitia Kerja yang dibentuk antara lain adalah Panitia Kerja tentang Mafia Pemilu, Panitia Kerja Aset-Aset Negara, Panitia Kerja Alat Utama Sistem Persenjataan, Panitia Kerja Anak yang berkaitan terhadap berbagai permasalahan anak, Panitia Kerja Pengungsi yang terkait dengan penanganan warga masyarakat eks Timor Timur, dan membentuk Panitia Kerja Sistem Pelayanan Kesehatan Dasar dan Sistem Rujukan.

Pada Persidangan II Tahun Sidang 2010—2011, Komisi DPR membentuk 2 Panitia Kerja, yaitu Panitia Kerja Jamsostek dan Panitia Kerja Uji Kompetensi dan Penempatan Tenaga Dokter. Panitia Kerja Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 kg dan Panitia Kerja Minerba, juga telah dibentuk oleh Komisi Dewan.

Komisi DPR telah pula membentuk Panitia Kerja Inflasi dengan tujuan melakukan evaluasi dan *review* terhadap aturan dan kewajiban Pemerintah dalam melakukan pengendalian inflasi. Juga telah dibentuk Panitia Kerja Utang dan Piutang Negara dengan tujuan utama mengetahui posisi, profil dan dampak serta *roadmap* penyelesaian utang dan piutang negara.

Terkait kelembagaan Panitia Kerja, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah dan para *stakeholder* untuk percepatan pencapaian MDGs 2015, DPR melalui BKSAP, membentuk Panitia Kerja *Millennium Development Goals* (MDGs).

Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Fungsi pengawasan DPR-RI juga dilakukan melalui kunjungan kerja Komisi-Komisi DPR ke daerah dan kunjungan perorangan. Dalam kunjungan kerja Komisi, banyak ditemukan adanya permasalahan yang perlu ditindaklanjuti dalam Rapat-Rapat Kerja ataupun Rapat Dengar Pendapat dengan

Pemerintah, untuk mempertajam fokus pelaksanaan fungsi pengawasan.

Perlu disampaikan bahwa beberapa hasil pengawasan DPD-RI yang memperoleh persetujuan DPR-RI sudah diserahkan proses penanganannya kepada alat kelengkapan DPR-RI yang membidangnya.

Perlu saya sampaikan bahwa sepanjang Tahun Sidang 2010—2011 DPR-RI telah berupaya melakukan fungsi pengawasan dengan baik. Harus diakui, dalam fungsi pengawasan dijumpai kebijakan Pemerintah yang tidak terlaksana dengan baik, bahkan ditemukan berbagai penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, aturan yang sesungguhnya memiliki keberpihakan kepada masyarakat, implementasinya masih lemah.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

DPR-RI diharapkan dapat mempertanggungjawabkan keterwakilannya dengan memperhatikan dan menindaklanjuti berbagai macam pengaduan ataupun aspirasi masyarakat atau konstituen. Pada Tahun Sidang 2010—2011 dalam kurun waktu sejak Agustus 2010 hingga Juli 2011, pengaduan dan aspirasi masyarakat yang cukup menonjol terkait masalah pertanahan

dan hukum, dimana hal ini menjadi domain Komisi II dan Komisi III DPR-RI untuk menanganinya. Total surat pengaduan yang masuk ke Pimpinan DPR-RI dalam satu tahun sidang sebanyak 1.525 surat. DPR-RI juga menerima pengaduan melalui website sebanyak 1.347 dan sudah diteruskan ke Alat Kelengkapan DPR RI terkait sebanyak 448 aspirasi untuk kurun waktu Masa Sidang I sampai dengan Masa Sidang III. Khusus untuk Masa Sidang IV, DPR RI mencoba untuk menindaklanjuti pengaduan melalui *website* dengan skala prioritas. Sedangkan melalui pesan singkat untuk kurun waktu sejak diluncurkannya akses ini yaitu Mei sampai dengan Juli 2011 sebanyak 1.523 aspirasi telah diterima oleh DPR-RI.

Selanjutnya, untuk memproses pengaduan-pengaduan masyarakat tersebut, DPR-RI telah menggunakan sistem skala prioritas dengan tetap menganggap penting semua pengaduan yang ada. Tidak ada yang dianak-tirikan dalam hal penindaklanjutan atas aspirasi-aspirasi masyarakat.

Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Peran DPR dalam pergaulan antarbangsa juga telah diupayakan untuk ditingkatkan dari tahun ke tahun. *Alhamdulillah*, DPR-RI telah sukses menyelesaikan amanah sebagai Presiden *Asian Parliamentary Assembly (APA)*, *Forum of Asia Pasific Parleментарians for Education (FASPPED)*, dan

sekarang diberi kepercayaan untuk memegang posisi penting, antara lain menjadi *Chair of Asia Pacific Geopolitical Group* (APG) IPU periode Oktober 2010-Oktober 2011, *First Vice-President of IPU Women Coordinating Committee*, Anggota Tetap *Committee of Middle East Question IPU*, Anggota Tetap *International Humanitarian Laws Committee*, *focal point* untuk *United Nations Convention to Combat Dessertification* (UNCCD), *focal point* untuk masalah HIV/AIDS di badan kesehatan PBB, Wakil Presiden PUIC 2010-2012 dan Presiden PUIC *Conference* 2012-2013, dan anggota *Preparatory Committee* untuk *World Conference Speaker of Parliaments*.

Di luar jalur formal itu, sejumlah Anggota DPR-RI juga aktif merespon dan turut mencari solusi atas berbagai isu internasional yang diminatinya melalui kaukus-kaukus yang dibentuk dan diikutinya, seperti Kaukus Parlemen Indonesia untuk Palestina dan Kaukus antarparlemen ASEAN untuk Myanmar. Kiprah diplomasi Anggota DPR RI ini tidak saja melengkapi diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah, tetapi justru dapat memperkuat dan bahkan dapat turut memainkan peran penting dan efektif dalam pencapaian diplomasi Indonesia.

Selanjutnya, berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang DPR RI dalam proses pengajuan, pemberian persetujuan atau pertimbangan pejabat publik, pada kurun

waktu 2010 sampai pertengahan 2011 ini, DPR RI melalui Alat Kelengkapan DPR RI juga sudah melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) serta persetujuan terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas LPP TVRI Periode 2011—2016, Calon Anggota Ombudsman, Calon Pengganti Pimpinan KPK, Calon Hakim Agung, Calon KAPOLRI, Calon Anggota Komisi Yudisial, Calon Anggota KPAI Periode 2010-2013, serta proses pemberian pertimbangan terhadap Calon Duta Besar Negara Sahabat. Atas berbagai proses uji kelayakan dan kepatutan tersebut, sesuai tugas, wewenang serta peran DPR RI sebagai lembaga politik, proses tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan yang objektif dan rasional.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

DPR-RI periode 2009—2014 telah sepakat dan bertekad serta berupaya untuk memperbaiki kinerja sebagaimana menjadi tuntutan masyarakat. Upaya tersebut telah dituangkan dalam sebuah dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis (Renstra) DPR 2010—2014 yang merupakan dokumen perencanaan strategis yang pertama kali dimiliki sepanjang sejarah DPR. Renstra ini menjadi pedoman bagi DPR dalam menyusun program dan kegiatan, guna menyelenggarakan tugas-tugas konstitusional DPR, dan

Sekretariat Jenderal dalam mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi DPR.

Untuk memperkuat dan meningkatkan kinerja pelaksanaan 3 fungsi DPR, Renstra DPR 2010—2014 memiliki agenda penguatan kelembagaan. Hal utama yang menjadi perhatian adalah bagaimana mengoptimalkan dukungan substansial/keahlian kepada DPR agar produk-produk yang dihasilkan DPR dapat dipertanggungjawabkan, baik secara konsepsi maupun praktis. Oleh karena itu, DPR merencanakan untuk membangun sebuah badan fungsional keahlian. DPR RI juga terus mendorong terlaksananya proses reformasi di lingkungan kesetjeraan DPR RI dan upaya pembentukan Unit Pengawas Internal guna meningkatkan akuntabilitas setiap penggunaan anggaran DPR RI.

Banyaknya kritik masyarakat terhadap kunjungan ke luar negeri, ditanggapi dengan dilakukannya pembenahan internal DPR, yaitu kebijakan memperketat perizinan untuk melakukan Kunjungan Kerja ke luar negeri bagi Komisi-Komisi dan panitia Khusus. Untuk sementara, izin Kunjungan Kerja DPR ke Luar Negeri hanya diberikan kepada Alat Kelengkapan DPR Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), khususnya untuk menghadiri sidang-sidang internasional dan Komisi I, sesuai dengan tugasnya.

Dalam pada itu, untuk meningkatkan etika internal kinerja DPR, melalui Rapat Paripurna pada tanggal 29 Maret 2011 telah disahkan Peraturan DPR tentang Kode Etik dan Peraturan DPR tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR. Diharapkan, dengan Kode Etik yang baru dan Peraturan DPR tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR maka, badan ini akan efektif melakukan tugasnya untuk menegakkan etika dan kedisiplinan anggota dan menjaga martabat lembaga DPR.

Kami sangat menyadari, banyak kritik masyarakat terhadap Badan kehormatan DPR. Sebagian bahkan mempersoalkan pasal 124 UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, berkaitan dengan susunan dan keanggotaan Badan kehormatan. Perlu diketahui bahwa Badan Kehormatan adalah Alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Sama dengan keanggotaan Alat Kelengkapan DPR lainnya, anggota Badan Kehormatan adalah anggota DPR. Kita akui, masih diperlukan peningkatan peran dan fungsinya di dalam menegakkan citra DPR.

Sementara itu, kepada jajaran Sekretariat Jenderal, Pimpinan selalu meminta adanya penguatan kelembagaan Sekretariat Jenderal sebagai lembaga pendukung pelaksanaan fungsi Dewan. Kita perlu memberikan apresiasi kepada jajaran Sekretariat Jenderal yang telah mendapatkan opini "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) oleh BPK terhadap Laporan

Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2010. Opini WTP ini merupakan prestasi Kesekjenan terhadap opini serupa atas Laporan Keuangan tahun 2009. Kita mengharapkan capaian ini dapat dipertahankan untuk tahun-tahun mendatang.

Mengakhiri Rapat Paripurna Peringatan HUT MPR/DPR RI ke-66 ini, izinkanlah saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada jajaran pers yang telah memberikan kontribusi besar dalam mensosialisasikan peran dan fungsi DPR kepada masyarakat, serta turut melakukan pengawasan terhadap kinerja DPR RI. Marilah kita terus menjalin kerjasama ini sehingga antara DPR RI dan insan pers dapat saling bersinergi dalam memberikan informasi yang konstruktif dan proporsional kepada masyarakat.

Selanjutnya kami mempersilahkan Saudara Djamal Azis B.Sc, SH., MH., dari Fraksi Hanura untuk membacakan doa. Saya persilakan;

Doa oleh Anggota Dewan

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Djamal Azis B.Sc, SH, MH. yang telah membacakan doa, kiranya Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, mengabulkan doa kita bersama. Amien.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Demikianlah Pidato Ketua DPR RI dalam rangka Peringatan HUT MPR/DPR RI ke-66 sekaligus penyampaian Laporan Kinerja DPR RI dalam kurun waktu Masa Sidang I sampai IV Tahun Sidang 2010-2011. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian sehingga Sidang ini dapat berjalan dengan baik. Dengan ini saya menutup Sidang dengan mengucapkan *Alhamdulillahirrabil'alamin.*

“DIRGAHAYU MPR/DPR-RI”

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

KETOK 3 X

Jakarta, 6 September 2011

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

Dr. H. MARZUKI ALIE